

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Aminuddin. 2017. Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku. **Tesis, Universitas Brawijaya.**
- Anggraeni, Felicia Asri. 2016. Pengaruh Rasio Ketergantungan, Kemandirian, Efisiensi, Dan Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Jawa Timur. *Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBARNAS.*
- Aprizay, Y.S., Darwanis, Arfan, M. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi.*
- Aransi, Olalekan Isiaka. Adefeso, Hammed Adetola. 2017. *Analysis of the State and Local Governments Finance in Nigeria's Fourth Republic.* **Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development. Vol 8, No. 15.**
- Desi Zeatiffani., S. Abdullah. 2018. Pengaruh SiLPA dan Ketergantungan Fiskal terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera dengan Klasifikasi Pemerintah Daerah sebagai PEMBEDA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi (JIMEKA). Vol 3, No. 4, Hal 568-584.*
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. djpk.go.id. 2019. *Dana Bagi Hasil.* Diakses pada 12 September 2019 dari Website: <https://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. djpk.go.id. 2019. *Ringkasan APBD Tahun 2017-2018.* Diakses pada 12 September 2019 dari Website: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf>
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jones, Rowan & Maurice Pendlebury. 2010. *Public Sector Accounting. Sixth Edition,* Pitmen. London.

Jensen & Meckling. 1976. *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. **Journal of Financial and Economics**. Vol 3, Hal 305-360.

Junaedy. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.

Jubery, M. 2017. Implementasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Desentralisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten (*PERSPEKTIF AGENCY THEORY*). *Scientium: Jurnal Ilmiah Dewan Riset Daerah Banten*, 6(1), 40-58.

Kartikasari, R., Fuad. 2014. Pengaruh Tingkat Kemandirian dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah, Tingkat Kemandirian dalam Mengelola Potensi Daerah, dan SiLPA terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2012). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*. Vol 3 No. 2, Hal 2337-3806.

Kasiram, Mih. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.

Kasdy, Laila Murhani, dkk. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Indonesia*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol 4 No. 1.

Kementerian Keuangan. *Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis*. 2017. Diakses pada 14 September 2019 dari website: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>

Novianto Riko, Hanafiah Rafiudin. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Primbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi*. Vol 4 No. 1

Nugraha, Yoga Nurdiana. Detik.com. 2019. *Desentralisasi dan Ketergantungan Fiskal Daerah*. Diakses pada 12 September 2019 dari website <https://news.detik.com/kolom/d4406834/desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal-daerah>.

Olayemi O.F, Olayungbo D.O. 2018. *Dynamic Relationship Among non-oil Revenue, Government Spending and Economic Growth in an Oil Producing Country: Evidence from Nigeria*. **Departement of**

**Economic. Future Business Journal. Obafemi Awolowo University. Ile-Ife, Nigeria.**

Peraturan Menteri Keuangan No. 102/ PMK. 02/ 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/ PMK. 07/ 2007 tentang *Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, *Tentang Dana Perimbangan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Salamadian. 2018: Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, Asas, Pelaksanaan & Dasar Hukum. Diakses pada 25 September 2019 dari Website: <https://salamadian.com/pengertian-otonomi-daerah-di-indonesia/>

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan: Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Belanja Modal. Diakses pada 25 September 2019 dari Website: <https://www.ksap.org/sap-akuntansi-pemerintahan/>.

Reily, Michael. Katadata.co.id. 2018. *Sri Mulyani Soroti Belanja Modal Pemda yang Minim.* Diakses pada 8 Januari 2020 dari website <https://katadata.co.id/berita/2018/12/11/sri-mulyani-soroti-belanja-modal-pemda-yang-minim>.

Safitri, Sani. 2018. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. ***Jurnal Criksetra. Vol 5 No. 9.***

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.

Susanti, Susi dan Fahlevi Heru. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/ Kota di Wilayah Aceh). ***Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi (JIMEKA). Vol No. 1, Hal 183-191.***

Takaaki. 2018. *The Impact of Intergovernmental Transfers on Local Revenue Generation in Sub-Saharan African: Evidence form Tanzania. World Development. Washington, DC 20433, United States.*

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 2008. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tri Wulansari, D., & CA, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013) (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Panduan Penulisan Skripsi 2019*. 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah

Purwokerto.